BAB V
KESIMPULAN

Pekerja anak merupakan masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia. Selain itu fenomena pekerja anak merupakan gambaran bertapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak di dunia. Pada umumnya pekerja anak adalah semua anak yang melakukan pekerjaan pada jenis pekerjaan yang disebabkan karena kondisi-kondisi yang melekat pada pekerjaan tersebut dimana apabila anak-anak melakukan hal tersebut dapat membahayakan anak, melukai anak baik secara jasmani,emosi, maupun seksual.

Pada umumnya istilah pekerja anak di Thailand dipandang sebagai hal yang wajar dalam masyarakat hal tersebut dikarenakan bekerja adalah suatu tindakan yang dianggap baik dan mampu mengubah citra sebuah keluarga. Hal ini menjadi berbeda ketika kita membicarakan pekerja anak dibawah umur salah satu contohnya anak yang berusia dibawah 15 tahun yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Pada umumnya anak-anak yang berusia 10 sampai 17 tahun diwajibkan untuk menempuh pendidikan sebagai modal dasar untuk masa depan seseorang, tetapi di Thailand pendidikan menjadi terabaikan karena keterbatasan ekonomi masyarakat Thailand yang rata-rata memiliki pekerjaan dalam sektor pertanian, perikanan dan buruh dalam suatu perusahaan.

Di Thailand anak-anak terlibat dalam bentuk pekerja terburuk bahkan berbahaya. Salah satu bentuk pekerjaan yang membahayakan yaitu terjadi dalam sektor pertanian dan sektor perikanan (industri makanan laut dan udang).Dalam

hal ini International Labour Organizations (ILO) hadir untuk membantu Pemerintah Thailand dalam mengurangi angka pekerja anak.ILO memiliki beberapa program-program yang dijalankan di Thailand program tersebut yaitu ILO-IPEC. IPEC memiliki tujuan tersendiri dalam menjalankan program di Thailand tujuannya ialah mengurangi pekerja anak dan pekerja paksa di industri udang dan makanan laut selain itu ILO juga melakukan survei tingkat perusahaan untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan bisnis dan praktek di udang dan industri makanan laut untuk membantu menginformasikan perbaikan kebijakan dan praktek instansi pemerintah, asosiasi produsen dan kelompok kerja yang berkaitan dengan mengatasi kondisi kerja.

Dalam menanggulangi kasus pekerja anak di wilayah Thailand bagian selatan ILO mengupayakan beberapa langkah dan tindakan seperti membuat pelatihan kerja bagi para masyarakat sekitar industri dan juga para pekerja di industri perikanan agar mereka memiliki kemampuan dan terampil dalam bekerja. Selain itu, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut baik bekerja maupun sekedar menemani orang tuanya untuk bekerja diberikan bekal pendidikan dan ilmu secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya sepersen pun. Hal tersebut hanya dapat menarik perhatian beberapa orang tua untuk memberikan peluang anak dalam memperoleh pendidikan, disamping itu beberapa orang tua lain tidak memperdulikan program tersebut.

Dalam menangani kasus pekerja anak di Thailand penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional. Dimana dalam konsep Organisasi Internasional terdapat fungsi-fungsi yang menentukan apakah organisasi tersebut berhasil atau

gagal dalam mencapai tujuan dan visi misinya. Lima fungsi yang terdapat dalam Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson, yaitu: fungsi informatif, normatif, role-creating, role supervisory, dan oprasional. Dalam hal ini ILO telah berhasil menjalankan fungsi normative, informative dan role creating. Dalam hal ini penulis akan memberikan kesimpulan secara singkat mengenai lima fungsi ILO dalam menagani kasus pekerja anak di Thailand.

Fungsi pertama, yaitu fungsi informasi. Dalam fungsi ini ILO telah menjalankan salah satu fungsi sebagai organisasi Internasional dalam mengatasi kasus perburuhan maupun kasus pekerja anak dengan cara melakukan pengumpulan data, analisa bahkan ILO dijadikan pusat informasi masyarakat di seluruh dunia khususnya Thailand. ILO juga memberikan beberapa pelatihan bagi masyarakat dan informasi mengenai perburuhan dan pekerja anak di Thailand sebagai sarana dalam mengkampanyekan dampak terburuk dari eksploitasi anak khususnya di Thailand.

Fungsi kedua, yaitu fungsi normative. Dalam hal ini ILO dianggap telah menjalankan fungsinya dengan baik hanya saja fungsi ini tidak mengikat instrumen-instrumen yang terlibat, tetapi ILO telah berhasil mempengaruhi masyarakat Internasional bahwa eksploitasi anak di Thailand harus segera diselesaikan salah satu caranya yaitu dengan diselenggarakannya beberapa konvensi Internasional agar segera ditemukan solusi yang tepat untuk kedepannya.

Fungsi ketiga, yaitu fungsi pembuatan peraturan. Dalam hal ini ILO memiliki

beberapa konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi oleh Thailand. Konvensi tersebut yaitu Konvensi ILO No. 182 mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk pekerja anak (tahun 1999) dan Konvensi Hak Anak pada tahun 1992.

Fungsi keempat, yaitu fungsi role-supervisory.Dalam hal ini ILO belum mampu menjalankan fungsi ini dengan baik dan benar.Pemerintah Thailand telah meratifikasi perjanjian dan juga peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan dan hak-hak perlindungan tenaga kerja. Salah satu contoh konvensi yang telah diratifikasi yaitu konvensi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak tahun 1999 (No. 182), konvensi mengenai Deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja, dan konvensi No. 138 yang mengatur mengenai usia minimum dalam bekerja (tahun 1973). Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan bukti bahwa ILO di Thailand telah menjalankan sedikit demi sedikit tugasnya.

Tetapi dalam melakukan pengawasan terutama sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ILO belum mampu menerapkan hukum atau sanksi yang telah dipaparkan di dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi.Hal tersebut dapat dilihat dari kurang tegasnya pemerintah Thailand dalam memberlakukan undang-undang mengenai pekerja anak yang telah tersedia.

Fungsi kelima, yaitu fungsi operasional. Dalam hal ini ILO belum berhasil dalam menjalankan fungsi organisasi ini dikarenakan ILO belum dapat mengalokasikan keuangan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan ILO tidak cukup menindaklanjuti hasil evaluasi untuk mengarahkan dana ke daerah yang berkinerja baik dan ILO memiliki keterbatasan dalam membangun sarana dan fasilitas pendukung infrastruktur di Thailand.

ILO memiliki satu program unggulan dalam mengatasi kasus pekerja anak di Thailand program tersebut yaitu ILO-IPEC. Namun program ini tidak efektif berjalan karena jumlah pekerja anak pada tahun 2006-2012 terus mengalami kenaikan dan penurunan. Selain itu karena kurang tegasnya pemerintah Thailand dalam memberlakukan sanksi-sanksi maka ILO sebagai organisasi Internasional yang bertugas menangani kasus pekerja anak hanya dapat melakukan penyuluhan mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Thailand. ILO tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan, karena yang memiliki peran untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut yaitu pemerintah Thailand.